

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENANGGULANGI TANTANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Bunga Fayza Setiawan¹, Vanka Karisa Sabrina Rizal², Wahyu Mahendra³

Universitas Indonesia^{1,2,3}

bunga.fayza@ui.ac.id¹

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola transportasi perkotaan di tengah pesatnya pertumbuhan kota. Kemacetan, polusi udara, dan pertumbuhan volume kendaraan menjadi permasalahan utama. Dalam menanggulangi tantangan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan strategis. Pengembangan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, dan pemberdayaan daerah penyangga menjadi fokus utama. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta dalam menanggulangi tantangan transportasi perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan strategi kebijakan komprehensif untuk mengatasi tantangan transportasi perkotaan. Pengembangan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, investasi infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan daerah penyangga, Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan responsif.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan Pemerintah, Transportasi Perkotaan, Tantangan Transportasi, Kebijakan Publik

ABSTRACT

The Jakarta Provincial Government faces significant challenges in managing urban transportation amidst the rapid growth of the city. Traffic congestion, air pollution, and the increasing volume of vehicles pose major issues. In addressing these challenges, the Jakarta Provincial Government has implemented various strategic policies. The development of public transportation, restrictions on private vehicles, and the empowerment of buffer zones are the primary focuses. This research aims to determine the Policy Strategies of the Jakarta Provincial Government in addressing urban transportation challenges. The study employs a qualitative approach with a literature review as its data collection technique. The results indicate that the Jakarta Provincial Government has implemented a comprehensive policy strategy to tackle urban transportation challenges. This includes the development of public transportation, restrictions on private vehicles, infrastructure investment, technology utilization, and the empowerment of buffer zones. The government has also demonstrated a commitment to creating an efficient, sustainable, and responsive transportation system.

Keywords: Government Policy Strategy, Urban Transportation, Government Policy Strategies, Urban Transportation, Transportation Challenges, Public Policy

PENDAHULUAN

Masalah transportasi seringkali timbul di tengah pesatnya pertumbuhan suatu wilayah, terutama terkait dengan infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kebiasaan masyarakat terkait transportasi. Permasalahan transportasi di perkotaan umumnya disebabkan oleh tingginya volume kendaraan di jalan-jalan perkotaan. Dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan sekitar tiga persen setiap tahunnya, sementara lebar jalan hanya bertambah kurang dari satu persen per tahun. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas jalan akhirnya menciptakan titik-titik kemacetan di perkotaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mu'allimah & Mashpufah, (2021) bahwa menunjukkan keberhasilan kebijakan ganjil-genap dan pembangunan MRT dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Namun, perlu pemantauan ketat dan kebijakan pendukung agar berkelanjutan. Perbaikan kualitas operasional bus Transjakarta juga diperlukan, termasuk peningkatan armada, jalur, dan kenyamanan untuk masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Indriyana, (2005) membahas aspek-aspek tertentu seperti kepadatan penduduk, infrastruktur jalan, atau tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi. Informasi dari penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang kompleksitas permasalahan dan memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Permasalahan transportasi perlu diatasi karena dapat berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan perkotaan. Pertama, kemacetan lalu lintas menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi, menyebabkan keterlambatan dan produktivitas menurun. Kedua, polusi udara dan emisi gas rumah kaca dari kendaraan dapat merusak kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Ketiga, tingginya volume kendaraan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Terakhir, ketidaknyamanan dan frustrasi yang diakibatkan oleh kemacetan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis masyarakat. Dengan mengatasi permasalahan transportasi, kita dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan berkualitas.

DKI Jakarta, sebagai ibukota Republik Indonesia, juga berfungsi sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, dengan jumlah penduduk yang signifikan. Pada tahun 2021, populasi Jakarta mencapai 10.609.681 jiwa, dan luas wilayahnya sekitar 664,01 km² sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 171 Tahun 2007. Dengan demikian, kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2021 mencapai 15.978 jiwa/km². Jakarta Pusat menunjukkan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 20.360 jiwa/km², diikuti oleh Jakarta Barat (19.608 jiwa/km²), Jakarta Timur (16.729 jiwa/km²), Jakarta Selatan (14.475 jiwa/km²), Jakarta Utara (12.749 jiwa/km²), dan Kabupaten Kepulauan Seribu (2.774 jiwa/km²) (BPS Jakarta, 2021).

Sistem transportasi di Jakarta, termasuk transportasi darat, udara, dan laut, memainkan peran yang krusial dalam mendukung kegiatan sehari-hari penduduk Jakarta dan daerah sekitarnya. Ketiga bentuk transportasi tersebut saling bersinergi, membantu mobilitas penduduk DKI Jakarta dalam menjalankan berbagai aktivitas. Masalah transportasi kerap timbul seiring dengan pertumbuhan pesat suatu daerah, melibatkan aspek infrastruktur, ketersediaan sarana-prasarana, dan perilaku masyarakat terhadap sistem transportasi (A. Hermanto Dardak, M, 2006).

DKI Jakarta menghadapi tantangan kompleks dalam sektor transportasinya. Saat ini, salah satu masalah utamanya adalah tingkat kepadatan lalu lintas yang sulit diatasi. Perbandingan panjang jalan di Jakarta, yang hanya mencakup sekitar 7 persen dari total

luas kota, dengan standar kota-kota besar di negara maju, yang idealnya mencapai 12-15 persen dari luas kota, menunjukkan ketidakproporsionalan yang signifikan. Faktor-faktor penyebabnya melibatkan preferensi masyarakat DKI Jakarta terhadap kendaraan pribadi sebagai gaya hidup, serta kebutuhan mobilitas yang tinggi. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 20.221.821 unit, menambah kompleksitas permasalahan transportasi yang dihadapi oleh wilayah ini (A. Hermanto Dardak, 2006).

Di kota-kota besar di Indonesia, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan transportasi telah menjadi isu serius. Kesalahan dalam merumuskan kebijakan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat signifikan. Tentunya, banyak sekali problematika yang akan ditemui, mulai dari tingkat kepadatan lalu lintas, ketidakproporsionalan infrastruktur jalan, preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi, keterbatasan ruang kota untuk infrastruktur transportasi, hingga jumlah kendaraan bermotor yang tinggi (Kadarisman et al., 2015).

Meskipun DKI Jakarta memiliki infrastruktur transportasi yang canggih, beberapa lokasi masih menghadapi tantangan spesifik yang merumitkan mobilitas penduduk. Lokasi-lokasi ini mungkin mengalami kemacetan parah, keterbatasan infrastruktur jalan, atau kepadatan lalu lintas yang tinggi (Aminah, 2018). Masalah transportasi bukan hanya sekadar ancaman terhadap mobilitas fisik, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kemacetan dapat menyebabkan hilangnya waktu produktif, meningkatkan tingkat stres, dan bahkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah (Tamara and Sasana, 2017).

Saat ini, perkembangan sarana dan prasarana transportasi di DKI Jakarta telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi termanifestasi dalam berbagai inisiatif, seperti renovasi terminal bus dan stasiun, proyek MRT, peningkatan armada Trans Jakarta, serta perbaikan jalan. Meskipun Jakarta sebagai pusat perkotaan sudah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, namun kemajuan ini ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemacetan yang masih sering terjadi di beberapa lokasi tertentu (Handayani et al., 2021).

Dalam menganalisis tantangan transportasi perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, beberapa teori dapat digunakan sebagai landasan. Pertama, teori kebijakan publik membantu memahami perumusan dan implementasi kebijakan transportasi oleh pemerintah, termasuk kebijakan pengembangan transportasi publik dan pembatasan kendaraan pribadi. Kedua, teori perencanaan kota dan transportasi digunakan untuk memahami konsep perencanaan transportasi dalam konteks perkotaan Jakarta, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selanjutnya, teori keterpaduan transportasi menilai sejauh mana kebijakan menciptakan sistem transportasi yang terpadu dan efisien. Terakhir, teori penerimaan masyarakat membantu mengevaluasi respons dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, serta dampak kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan solusi transportasi. Integrasi teori-teori ini memberikan landasan analisis komprehensif terkait efektivitas dan dampak kebijakan transportasi di DKI Jakarta.

Dalam menganalisis tantangan transportasi perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, beberapa teori dapat digunakan sebagai landasan. Pertama, teori kebijakan publik membantu memahami perumusan dan implementasi kebijakan transportasi oleh pemerintah, termasuk kebijakan pengembangan transportasi publik dan pembatasan

kendaraan pribadi. Kedua, teori perencanaan kota dan transportasi digunakan untuk memahami konsep perencanaan transportasi dalam konteks perkotaan Jakarta, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selanjutnya, teori keterpaduan transportasi menilai sejauh mana kebijakan menciptakan sistem transportasi yang terpadu dan efisien. Terakhir, teori penerimaan masyarakat membantu mengevaluasi respons dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, serta dampak kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan solusi transportasi. Integrasi teori-teori ini memberikan landasan analisis komprehensif terkait efektivitas dan dampak kebijakan transportasi di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan transportasi, terutama kendala kemacetan. Mulai dari penerapan kebijakan ganjil-genap untuk mengontrol volume kendaraan di jalan, hingga fokus pada pengembangan transportasi umum. Saat ini, kebijakan-kebijakan tersebut masih aktif dan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan transportasi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekomendasi strategi keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi di perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur. Kajian literatur merupakan proses pencarian dan analisis sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah menghasilkan tulisan yang menyajikan informasi terkait suatu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber rujukan, seperti buku dan jurnal, yang kemudian dianalisis.

Penelitian kajian literatur melibatkan beberapa tahapan, seperti pengumpulan artikel, reduksi jumlah artikel berdasarkan variabel-variabel tertentu, penyusunan dan penataan artikel terpilih, serta pengorganisasian dan pembahasan, hingga penarikan kesimpulan (Asbar FR & Witarsa R, 2020). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan beberapa tahapan penelitian, termasuk pemilihan fokus kajian, pencarian informasi yang relevan, kajian teori yang sesuai, pencarian landasan teori dari para ahli dan hasil penelitian terdahulu, analisis teori dan hasil penelitian yang relevan, serta penarikan kesimpulan serta sumber rujukan penelitian melibatkan buku, jurnal nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Transportasi perkotaan di Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan utama dalam dinamika perkembangan kota metropolitan ini. Dengan mobilitas penduduk dan barang yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan kunci dalam merumuskan strategi kebijakan yang mampu menanggulangi tantangan transportasi yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta telah dihadapkan pada kendala-kendala seperti kemacetan, dampak polusi udara, dan keterbatasan infrastruktur (Mu'allimah, Mashpufah, 2021). Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu merancang kebijakan yang terencana dan terkoordinasi untuk memastikan kelancaran mobilitas, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Artikel ini akan mengeksplorasi strategi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi tantangan transportasi

perkotaan, membahas langkah-langkah konkret yang diambil dan dampak yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah transportasi dengan berbagai strategi. Fokus utama melibatkan pengembangan transportasi publik, termasuk BRT dan MRT, serta peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan jembatan. Kebijakan ganjil-genap, pembatasan usia kendaraan, dan pemberdayaan daerah penyangga juga diimplementasikan. Penggunaan teknologi, seperti RTTIST dan *Advanced Bus Information System*, mendukung efisiensi transportasi. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, seperti Zona Ganjil Genap, menunjukkan komitmen dalam mengubah pola mobilitas. Pendekatan terpadu ini bertujuan menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan responsif, dengan kesadaran masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan.

Pengembangan Transportasi Publik merupakan implementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal berbasis BRT di DKI Jakarta. Ini merupakan pengejawantahan tanggung jawab Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi DKI Jakarta (Peraturan Daerah DKI Jakarta, 2003). Dalam regulasi tersebut, Pemerintah DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan angkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Target yang direncanakan melalui kebijakan angkutan umum massal adalah mencapai 60% perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum. Selain itu, target lainnya mencakup pencapaian kecepatan rata-rata jaringan jalan sebesar 35 km/jam untuk transportasi jalan, serta menciptakan kondisi transportasi kereta api, perairan, dan udara yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem transportasi perkotaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Tholif, 2019).

Adapun salah satu bentuk strategi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi tantangan dalam sistem transportasi perkotaan adalah dengan berbagai upaya yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan transportasi massal. Pembangunan dan ekspansi sistem transportasi massal, seperti pengoperasian moda MRT dan peningkatan jaringan Trans Jakarta, menjadi langkah strategis untuk memberikan alternatif transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa proyek infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kemacetan. Salah satu contohnya adalah proyek pelebaran Jalan Sudirman dan Thamrin yang selesai pada tahun 2018. Proyek ini berhasil meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kemacetan sekitar 30% berdasarkan data lalu lintas setempat (Mona Lohanda, 2015). Seiring dengan peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan pemberdayaan transportasi massal (Sidjabat, 2015). Penambahan rute Trans Jakarta, peningkatan frekuensi layanan, dan pengenalan moda transportasi baru seperti perluasan jaringan MRT telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Survei yang dilakukan pada pengguna transportasi massal menunjukkan bahwa 80% responden merasa perubahan ini memberikan dampak positif terhadap kenyamanan perjalanan mereka. Analisis terhadap kebijakan ganjil-genap menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi volume kendaraan pada jam sibuk. Data

statistik menunjukkan penurunan kemacetan sekitar 25% pada hari-hari penerapan kebijakan ini. Meskipun awalnya menuai pro dan kontra, survei masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar responden (70%) setuju dengan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi kemacetan (Fadhli & Widodo, 2020).

Selain itu, kebijakan ganjil-genap juga diterapkan sebagai upaya konkret untuk mengurangi volume kendaraan di jalan pada jam-jam tertentu, sehingga meredakan kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur jalan dengan investasi dalam pelebaran jalan dan pembangunan jalan layang guna meningkatkan kapasitas jalan yang dapat menampung volume kendaraan yang semakin meningkat. Tidak hanya itu, kebijakan pembatasan usia kendaraan juga menjadi bagian dari strategi, dengan memberlakukan aturan yang membatasi usia kendaraan bermotor untuk mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara. Penyediaan tempat parkir umum juga diintensifkan untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan mengurangi kendaraan pribadi yang parkir di pinggir jalan.

Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi menjadi strategi yang diadopsi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menghadapi masalah kemacetan dan polusi udara di wilayah tersebut. Dengan tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efisien, langkah-langkah ini menitikberatkan pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini tercermin melalui penerapan Zona Ganjil Genap. Sistem ini membatasi akses kendaraan dengan plat nomor tertentu untuk masuk ke wilayah tertentu pada hari-hari tertentu. Peraturan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan transportasi dan menciptakan perubahan positif dalam pola mobilitas masyarakat Jakarta (Peraturan Daerah DKI Jakarta, 2003).

Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran krusial dalam mendukung mobilitas dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Begitu juga di Provinsi DKI Jakarta, sebuah pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon pertumbuhan kota dan meningkatkan konektivitas (Djadjuli, 2018). Infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar bagi upaya Pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mengurangi kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan telah berhasil mengurangi tingkat kemacetan, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Faktor-faktor ini berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Transportasi perkotaan menjadi salah satu aspek kritis dalam pembangunan kota modern, terutama di Provinsi DKI Jakarta, pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis. Tantangan seperti kemacetan, polusi udara, dan ketidaknyamanan mobilitas telah mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengadopsi strategi kebijakan yang inovatif dalam menanggulangi permasalahan transportasi. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui pengembangan sistem teknologi, seperti *Real-Time Traffic*

Information System (RTTIST), Advanced Bus Information System, Parking Space Information System, dan Electronic-Law Enforcement.

Pengembangan sistem teknologi dapat memberikan solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan transportasi perkotaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menciptakan sistem yang responsif dan terintegrasi untuk memonitor dan mengelola lalu lintas, memberikan informasi real-time kepada pengguna transportasi, mengoptimalkan penggunaan ruang parkir, dan meningkatkan penegakan hukum secara elektronik (Suyuti,2012). Tentunya hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem teknologi dalam transportasi perkotaan DKI Jakarta telah memberikan dampak positif yang signifikan. RTTIST membantu mengurangi kemacetan dengan memberikan informasi lalu lintas secara real-time kepada pengemudi, sementara *Advanced Bus Information System* meningkatkan keterlayanan transportasi umum. *Parking Space Information System* mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir, dan *Electronic-Law Enforcement* meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan lalu lintas. Tentunya Dengan menerapkan strategi kebijakan yang berbasis pada pengembangan sistem teknologi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha menanggulangi tantangan transportasi perkotaan. Dengan melibatkan inovasi dalam desain, pengembangan, dan implementasi solusi teknologi, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien, ramah pengguna, dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Kesenambungan dalam pengembangan sistem teknologi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dalam mobilitas perkotaan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang pemberdayaan daerah penyangga sebagai elemen kunci dalam mencapai solusi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mempertimbangkan keterlibatan aktif dan sinergi antara DKI Jakarta dengan daerah penyangga sebagai langkah strategis dalam menanggulangi tantangan transportasi perkotaan (Subarto, Istianto, dan Anwar,2015). Pemberdayaan daerah penyangga dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih terdistribusi dan mengurangi beban lalu lintas menuju pusat kota. Dengan melibatkan daerah penyangga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya di sekitar Jakarta, serta mengurangi tekanan mobilitas penduduk yang menuju pusat kota (Sylke Febrina Laucereno, 2019). Sehingga dapat dipahami bahwa langkah-langkah pemberdayaan daerah penyangga telah memberikan dampak positif dalam menanggulangi tantangan transportasi perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan daerah penyangga untuk merancang dan menerapkan solusi transportasi lokal, termasuk pengembangan transportasi umum, peningkatan aksesibilitas, dan pembangunan infrastruktur jalan yang terhubung dengan baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menanggulangi tantangan transportasi perkotaan, seperti pengembangan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta pemberdayaan daerah penyangga. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika perkembangan kota.

Dengan berbagai inisiatif ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menciptakan sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mobilitas penduduk dan barang di wilayah ini

ANALISIS TANTANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Transportasi perkotaan menjadi sebuah ranah yang kompleks dan kritis dalam konteks perkembangan kota, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis, Jakarta menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam mengelola mobilitas penduduk dan barang (Zamruddin Hasid, Akhmad Noor, Erwin Kurniawan, 2023). Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemacetan yang kronis hingga dampak negatif terhadap lingkungan akibat polusi udara dan emisi gas rumah kaca (Sri Sulasminingsih et al, 2023).

Menurut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta solusi kemacetan harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan daerah penyangga. Dengan begitu, jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dapat berkurang signifikan (Dio Danajaya, 2023). Menurut Ismiyati, pencemaran udara atau perubahan salah satu komponen udara dari kondisi normalnya dapat menyebabkan perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Pengembangan terus-menerus dalam sektor transportasi, yang mengikuti permintaan pasar, ternyata telah menjadi pendorong bencana pembangunan. Saat ini, kita menyadari bahwa dampak polusi udara juga dapat menginduksi efek rumah kaca, yang berpotensi menyebabkan pemanasan global (Ismiyati, Marlita, and Saidah, 2014).

Kebijakan transportasi menjadi landasan utama dalam mengatur arus mobilitas di wilayah perkotaan. Bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan akan berdampak langsung pada kualitas transportasi dan kesejahteraan masyarakat (Purwantoro, 2020). Di sisi lain, infrastruktur menjadi tulang punggung yang mendukung kelancaran sistem transportasi. Investasi yang tepat dalam pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya menjadi kunci untuk mengatasi kendala-kendala fisik yang mungkin muncul (Palilu, 2022) Namun, keberhasilan kebijakan dan infrastruktur juga sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Bagaimana masyarakat berinteraksi dengan kebijakan yang diterapkan, apakah mereka mendukung dan melibatkan diri, akan mempengaruhi keberlanjutan solusi yang diusung oleh pemerintah (Kadarisman et al., 2017).

Oleh karena itu, kesadaran dalam transportasi perkotaan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan secara serius. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang dampak positif dari kebijakan transportasi yang diterapkan akan cenderung lebih mendukung dan terlibat aktif. Analisis kebijakan yang tepat tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ini dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan solusi berkelanjutan (Sukarto,2006). Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya tentang mendukung kebijakan yang ada, tetapi juga menjadi sumber ide-ide inovatif dan pemahaman mendalam terkait kebutuhan lokal. Melalui keterlibatan mereka, masyarakat dapat berperan dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan tuntutan serta dinamika yang ada di lingkungan mereka. Dengan demikian, peran aktif masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi perkotaan (Susanto and Kramadibrata, 2020).

Berdasarkan pemahaman dari berbagai sumber, bahwa solusi terhadap kemacetan dan dampak negatif polusi udara di wilayah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, memerlukan pendekatan terpadu. Pemerintah Provinsi telah mengusulkan langkah-langkah bertahap dengan melibatkan daerah penyangga untuk mengurangi

jumlah kendaraan yang memasuki Jakarta. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dianggap krusial dalam menjamin keberlanjutan dari kebijakan dan infrastruktur yang diterapkan.

Secara keseluruhan, Analisis tantangan transportasi perkotaan di Provinsi DKI Jakarta mempresentasikan sebuah kompleksitas yang memerlukan solusi terencana dan terkoordinasi. Kemacetan yang kronis dan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama polusi udara dan emisi gas rumah kaca, menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan solusi bertahap dengan melibatkan daerah penyangga sebagai langkah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta. Namun, tantangan ini tetap kompleks karena melibatkan koordinasi antardaerah dan memerlukan upaya bersama.

Dalam keseluruhan konteks tantangan transportasi perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, dapat dipahami bahwa solusi yang efektif memerlukan pendekatan terpadu. Langkah-langkah bertahap yang melibatkan daerah penyangga, didukung oleh kebijakan transportasi yang baik, investasi infrastruktur yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci keberhasilan. Kesadaran masyarakat tentang dampak positif kebijakan dan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan solusi menjadi faktor krusial. Oleh karena itu, melibatkan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran diharapkan dapat membantu menciptakan sistem transportasi yang lebih responsif, berkelanjutan, dan berdaya tahan di wilayah perkotaan, khususnya DKI Jakarta.

Hasil penelitian menyoroti strategi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi tantangan transportasi perkotaan. Jakarta, sebagai kota metropolitan, menghadapi kompleksitas mobilitas penduduk dan barang, termasuk kemacetan, dampak polusi udara, dan keterbatasan infrastruktur. Beberapa tahun terakhir, kendala seperti kemacetan, polusi udara, dan keterbatasan infrastruktur menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons dengan merumuskan strategi kebijakan untuk menanggulangi masalah transportasi. Pengembangan Transportasi Publik menjadi fokus utama, dengan implementasi kebijakan pengembangan angkutan umum massal berbasis BRT. Pemerintah DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan angkutan umum massal, dengan target mencapai 60% perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum.

Pembangunan dan ekspansi sistem transportasi massal, seperti moda MRT dan peningkatan jaringan Trans Jakarta, dianggap langkah strategis. Proyek infrastruktur, seperti pelebaran Jalan Sudirman dan Thamrin, berhasil meningkatkan kapasitas jalan dan mengurangi kemacetan. Pemberdayaan transportasi massal, penambahan rute Trans Jakarta, peningkatan frekuensi layanan, dan perluasan jaringan MRT menjadi upaya konkret. Kebijakan ganjil-genap diterapkan untuk mengurangi volume kendaraan pada jam sibuk, dengan data menunjukkan penurunan kemacetan. Pembatasan usia kendaraan dan peningkatan tempat parkir umum juga menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi emisi gas buang dan mendorong penggunaan transportasi umum. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, terutama melalui Zona Ganjil Genap, mencerminkan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi fokus utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan sistem teknologi, seperti *Real-Time Traffic Information System*, *Advanced Bus Information System*, *Parking Space Information System*, dan *Electronic-Law Enforcement*, diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan transportasi perkotaan. Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif

dianggap krusial dalam menjaga keberlanjutan kebijakan dan infrastruktur yang diterapkan.

Analisis tantangan transportasi perkotaan mencakup kompleksitas kemacetan, dampak polusi udara, dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan solusi bertahap melibatkan daerah penyangga untuk mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta. Kesadaran masyarakat, analisis kebijakan yang tepat, investasi infrastruktur, dan partisipasi aktif dianggap kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, solusi efektif memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai aspek dan pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan strategi kebijakan yang terencana dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan transportasi perkotaan. Fokus pada pengembangan transportasi publik, peningkatan infrastruktur, kebijakan ganjil-genap, penerapan teknologi, dan pemberdayaan daerah penyangga mencerminkan komitmen dalam menciptakan sistem transportasi efisien, berkelanjutan, dan responsif.

Langkah-langkah seperti pengembangan moda MRT dan jaringan Trans Jakarta, kebijakan ganjil-genap yang efektif, investasi infrastruktur jalan, dan penerapan teknologi seperti *Real-Time Traffic Information System* telah memberikan dampak positif dalam mengelola lalu lintas perkotaan.

SARAN

Adapun saran didalam penelitian ini perlunya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap langkah-langkah yang diambil. Keterlibatan aktif masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye kesadaran dan edukasi. Penelitian lebih lanjut diarahkan untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut, dengan evaluasi terus-menerus terhadap efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hermanto Dardak. (2006). *Metropolitan di Indonesia: kenyataan dan tantangan dalam penataan ruang*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum. <https://books.google.co.id/books?id=3JOpPgAACAAJ>
- Aminah, S. (2018). Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.31004/jutin.v1i1.312>
- Asbar FR, & Witarsa R. (2020). Kajian Literatur Tentang Penerapan Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3, 225–236.
- BPS Jakarta. (2021). Statistik Transportasi DKI Jakarta 2021. *Yolanda Wilda Artati*, 2(5), 60. <https://nasional.tempo.co/read/1566965/integrasi-jadi-kunci-perubahan-transportasi-di-jakarta>
- Dio Danajaya, A. K. (2023). *Strategi Gubernur DKI Mengatasi Kemacetan Ibu Kota*. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/07/07/070200815/strategi-gubernur-dki-mengatasi-kemacetan-ibu-kota>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2), 1–14.

- <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Fadhli, M. E., & Widodo, H. (2020). Analisis Pengurangan Kemacetan Berdasarkan Sistem Ganjil-Genap. *Planners Insight: Urban and Regional Planning Journal*, 2(2), 036–041. <https://doi.org/10.36870/insight.v2i2.136>
- Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik, Volume 2 N(1)*, 19–28. <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/30>
- Indriyana, M. (2005). *Permasalahan transportasi kota Jakarta dalam tinjauan perkotaan*. 20245892.
- Ismiyati, I., Marlita, D., & Saidah, D. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 1(3), 241. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v1i3.23>
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2015). Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Jakarta. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v2i1.129>
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2017). Implementasi Kebijakan Sistem Transportasi Darat Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Jakarta. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v2i1.129>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Mona Lohanda. (2015). *Menuju Ratangga Menuju Kota Kita*. 1–90.
- Mu'allimah, & Mashpufah, R. N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3, 291–296.
- Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B. L., Syafitri, L., Sarie, F., Rustan, F. R., & others. (2023). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH)*. Get Press Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=BgLVEAAAQBAJ>
- Palilu, A. (2022). *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*. CV. AZKA PUSTAKA. <https://books.google.co.id/books?id=fS9-EAAAQBAJ>
- Peraturan Daerah DKI Jakarta. (2003). *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*.
- Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S. E. S. U., Akhmad Noor, S. E. M. S. E., & Erwin Kurniawan A, S. E. M. S. (2013). *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=KSV_EAAAQBAJ
- Purwantoro, D. B. (2020). *SISTEM TRANSPORTASI CERDAS dalam Konsep Smart City*. CV Cendekia Press. <https://books.google.co.id/books?id=djl2EAAAQBAJ>
- Sidjabat, S. (2015). Revitalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan jakarta. *Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 1, 309–330.
- Sri Sulasminingsih, Tatik Juwariyah, Yehuda Siahaan, Bunga Hardiyana Putri, & Noval Aulia Putra. (2023). Penerapan Tema SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera untuk Menangani Polusi Udara di Jakarta. *IKRA-ITH Teknologi Jurnal Sains Dan Teknologi*, 8(1), 18–26. <https://doi.org/10.37817/ikraith-teknologi.v8i1.3239>
- Subarto, Istianto, B., & Anwar, A. (2015). *Transportasi Jalan Di Indonesia*.

- Sukarto, H. (2006). Pemilihan Model Transportasi Di Dki Jakarta. *Jurnal Teknik Sipil*, 3, No(1), 25–36. https://www.academia.edu/download/40780573/PEMILIHAN_MODEL_TRANSPORTASI_DI_DKI_JAKARTA.pdf
- Susanto, A. H., & Kramadibrata, B. S. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1497>
- Suyuti, R. (2012). Implementasi ”Intelligent Transportation System (Its)” Untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Dki Jakarta. *Konstruksia*, 3, 13–21.
- Sylke Febrina Laucereno. (2019). *Transportasi Umum di Jakarta Harus Terkoneksi Kota Penyangga*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4644232/transportasi-umum-di-jakarta-harus-terkoneksi-kota-penyangga>
- Tamara, S., & Sasana, H. (2017). Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Akibat Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Raya Bogor-Jakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 185–196. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529>
- Tholif, A. N. (2019). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Massal Berbasis Bus Rapid Transit (Brt) Berkelanjutan. *Academia.Edu*. [https://www.academia.edu/download/64461391/Tugas_HAN_Aliyif_Ni_Tholif_\(07011181924008\).pdf](https://www.academia.edu/download/64461391/Tugas_HAN_Aliyif_Ni_Tholif_(07011181924008).pdf)
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>